

ANALISIS KERENTANAN GENERAL SECURITY OF MILITARY INFORMATION AGREEMENT (GSOMIA) ANTARA KOREA SELATAN DAN JEPANG

Oleh: Refnedy Arpandi

refnedyarpandi@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.Int.Rel

Bibliografi: 4 Buku, 13 Jurnal, 1 Disertasi, 4 Dokumen, 10 Artikel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 07561-63277

Abstract

The focus of this research is the cooperation between South Korea and Japan under the General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) in facing North Korea's nuclear threat in the East Asia region. Due to geographical proximity, South Korea and Japan share the same perception of security threats within the region, i.e. North Korea's Nuclear. In response to this threat, GSOMIA was formed by the two countries in 2016 to monitor North Korea's nuclear activities in the region. However, in 2019 South Korea withdrew and was unwilling to continue GSOMIA with Japan due to a bilateral conflict rooted in the historical sentiments of the two relations. The purpose of this research is to analyse GSOMIA and to explain why GSOMIA is vulnerable to cooperation stagnation and termination.

In analyzing this cooperation, this research uses regional security complex theory. The position of this research topic is at the sub-system (regional) level to understand the behavior patterns and interactions of actors/states in the region that often carry out in groups and the tendency for interdependence in the security sector. This study uses qualitative research methods that are explanatory to obtain a deeper analysis and understanding. All data obtained are secondary data sourced from official publications by the South Korean and Japanese governments, reports published by independent organizations, and scientific journals.

The result of this research show that this cooperation is vulnerable and strongly influenced by the long-standing enmity factor. The history and conflict history between the two countries greatly influence the sustainability of GSOMIA. Can be seen from South Korea's decision to withdraw from cooperation and the worsening of bilateral relations between the two countries to their lowest point in 2019. Although it was finally continued, with the enactment of a clause that the two countries could end cooperation at any time, it further increased the risk of cooperation end.

Keywords: *General Security of Military Information Agreement (GSOMIA), Japan-South Korea, North Korea's Nuclear, long-standing enmity, regional security complex.*

PENDAHULUAN

Asia Timur merupakan kawasan yang sangat kompleks jika menilik perihal keamanannya. Dinamika keamanan kawasan Asia Timur umumnya berkisar pada tiga isu utama, yaitu masalah Jepang dengan negara-negara tetangga (terutama Korea Selatan), ketegangan hubungan antara Cina dan Jepang, dan perang saudara yang tidak kunjung selesai antara dua negara di Semenanjung Korea.¹ Hal ini kemudian menyebabkan tiap-tiap negara memiliki persepsi yang sama akan besarnya potensi konflik di antara mereka. Keadaan seperti ini akan memaksa setiap negara dalam kawasan untuk memikirkan urusan keamanan nasionalnya dengan berusaha untuk meningkatkan kekuatan militer dan kapabilitas persenjataannya.²

Sebagai negara yang berhadapan langsung dengan nuklir Korea Utara, Korea Selatan terus meningkatkan kapabilitas militernya sembari menjalin aliansi dengan Amerika Serikat. Hal yang sama pun dilakukan oleh Jepang dengan terus memperkuat hubungan aliansinya dengan Amerika Serikat bersamaan dengan membangun arsitektur pertahanan yang komprehensif meski masih dibatasi oleh UU Pasifis. Eksistensi Amerika Serikat sebagai aliansi Korea Selatan bersama Jepang yang secara konsisten membangun segitiga keamanan di kawasan mengakibatkan polaritas di kawasan yang menunjukkan tidak meratanya distribusi kekuatan di Asia Timur. Untuk mengimbangnya, Korea Utara pun melakukan upaya lebih dengan mengembangkan persenjataan nuklir.

Pada tahun 2006, Korea Utara secara resmi mendeklarasikan sebagai negara nuklir. sejak saat itu, intensitas aktivitas nuklir Korea

Utara terus meningkat, terutama setelah rezim Kim Jong-un berkuasa. Saat Kim Jong-un menggantikan ayahnya pada tahun 2010, uji coba rudal kendali yang akan menjadi hulu ledak nuklir mengalami peningkatan yang signifikan dari yang semula hanya sekitar delapan belas percobaan di masa kepemimpinan Kim Jong-il yang berlangsung selama delapan belas tahun, kemudian di masa Kim Jong-un mengalami peningkatan menjadi dua puluh lima percobaan (2011-2016).³

Selain peningkatan dalam jumlah uji coba, Korea Utara juga berkonsentrasi dalam mengembangkan kapabilitas misil, termasuk nuklir dan rudal balistik yang diluncurkan dengan kapal selam, dan juga telah bersiap untuk melakukan lebih banyak lagi uji coba nuklir dan tes peluncuran misil yang dapat dilakukan kapan saja.⁴ Situasi ini tentunya memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara yang berada di dalam kawasan sebab jumlah ancaman keamanan menjadi semakin bertambah mengingat situasi keamanan kawasan yang sudah sangat kompleks.

Dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara tersebut, Korea Selatan dan Jepang yang dibantu Amerika Serikat memiliki dua strategi yaitu, pertama mengerahkan sistem anti-rudal balistik atau *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD), dan strategi kedua menyusun kerangka hukum perjanjian kerja sama berbagi informasi militer atau *General Security of Military Agreement* (GSOMIA).⁵ Untuk memantau aktivitas nuklir Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang menggunakan strategi yang kedua, yakni bekerja sama dengan membentuk GSOMIA.

GSOMIA memungkinkan kedua negara untuk berbagi dan bertukar informasi

¹ M Najeri Al Syahrin, *Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas* (Sleman: Komojoyo Press, 2018), 7.

² Barry Buzan dan Ole Wæver, *Regions and Power: The Structure of International Security* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 152.

³ M Najeri, *Op.cit.*, 43-44.

⁴ Ministry of National Defense, *2016 Defense White Paper*, (Seoul, Republic of Korea: Ministry of National Defense, Republic of Korea, 2016), 257.

⁵ Jahyun Chun dan Yangmo Ku, "Clashing Geostrategic Choices in East Asia, 2009-2015: Re-balancing, Wedge Strategy, and Hedging," *The Korean Journal of International Studies* 18, no.1 (April 2020): 41, doi.org/10.14731/kjis.2020.04.18.1.33.

militer serta melindungi dan mengelola informasi yang telah dibagikan maupun ditukarkan satu sama lain. Sederhananya, GSOMIA mengatur bagaimana kedua negara dapat saling berbagi dan bertukar pengetahuan, teknologi, dan strategi di bidang militer (utamanya informasi intelijen), sehingga jika situasi keamanan memburuk di kawasan Asia Timur (akibat aktivitas nuklir Korea Utara), Korea Selatan dan Jepang dapat saling bertukar informasi dan menyiapkan strategi guna keamanan nasional (*national security*) kedua negara.⁶

Korea Selatan dan Jepang telah berkomitmen dengan meratifikasi GSOMIA sejak 2016 dengan dukungan dari Amerika Serikat, yang mana kerja sama ini telah diinisiasi sejak tahun 1989 oleh pemerintah Korea Selatan.⁷ Setiap tahunnya kedua negara harus memperbaharui kerja sama keamanan ini jika tidak ingin menarik diri atau mengakhirinya (salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian kepada pihak lainnya setidaknya 90 hari sebelum akhir jangka waktu).⁸

Setelah kerja sama berjalan selama kurang lebih empat tahun, Korea Selatan memutuskan untuk menarik diri dari GSOMIA dan berkeinginan untuk tidak melanjutkannya pada Agustus 2019. Tahun 2019 menjadi titik terendah hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan sejak melakukan normalisasi hubungan pertama kali pada tahun 1965.⁹ Hubungan keduanya memburuk setelah sederet permasalahan yang berlatar sejarah kembali mencuat dan menyebabkan friksi di antara keduanya. Isu-isu seperti pembayaran kompensasi bagi buruh masa perang,

penyelesaian masalah *comfort women*, hingga puncaknya *trade dispute* kedua negara mulai mewarnai hubungan keduanya hingga berimplikasi kepada GSOMIA. Korea Selatan yang dihapus dari daftar mitra dagang (*whitelist*) Jepang akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari GSOMIA dan berkeinginan untuk tidak memperpanjangnya. Hal tersebut menggambarkan rentannya GSOMIA untuk berakhir akibat faktor-faktor yang berhubungan dengan sentimen sejarah kedua negara atau konstruksi pola persahabatan dan permusuhan.

KERANGKA TEORI

Untuk menganalisis hubungan Korea Selatan dengan Jepang dalam konteks kerja sama GSOMIA, penelitian ini akan dibangun menggunakan perspektif keamanan dari Mazhab Kopenhagen (*Copenhagen School*) sebagai pondasi utamanya serta teori kompleks keamanan kawasan (*Regional Security Complex Theory*). Buzan yang merupakan salah satu pelopor/pendiri Mazhab Kopenhagen mengatakan bahwa faktor kedekatan geografis juga berpengaruh dalam struktur keamanan suatu negara serta interaksi atau keterlibatannya dengan aktor-aktor lain (yang berdekatan), begitu pula dengan ancaman keamanan yang akan diterima.¹⁰ Sehingga keamanan nasional suatu negara tidak dapat dipahami secara tunggal tanpa memahami pola hubungan saling ketergantungan keamanan (*security interdependence*) internasional yang melekat padanya.¹¹

Secara sederhana, dapat diasumsikan bahwa isu keamanan merupakan suatu

⁶ Seongho Sheen & Jina Kim, "What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact," *Asia Pacific Bulletin*, no. 176 (Juli 2012): 1-2.

⁷ David Kang dan Jiun Bang, "Japan-Korea Relations: What Goes Up, Must Come Down," *Comparative Connections* 18, no. 3 (Januari 2017): 92.

⁸ MND, Op.cit., 257.

⁹ Yuki Tatsumi. 'Fallout from Japan-South Korea tensions,' *japantimes.co.jp* (daring) 31 Januari 2019,

<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/01/31/commentary/japan-commentary/fallout-japan-south-korea-tensions/>, diakses pada 20 Agustus 2021.

¹⁰ Yanyan Mochamad Yani dkk., *Pengantar Studi Keamanan* (Malang: Intrans Publishing, 2017), 76.

¹¹ Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era 2nd Edition* (Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1991), 187.

fenomena relasional. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami bagaimana keamanan pada tingkat sub-sistem atau kawasan bekerja dan melihat dampak konflik internal terhadap keamanan dan perdamaian kawasan, pola perubahan kawasan, dinamika geopolitik dan lain sebagainya yang memberikan gambaran pola hubungan saling ketergantungan keamanan di antara negara-negara kawasan. Kemudian dalam memahami keamanan kawasan ini, Buzan menawarkan konsep *security complex*. Secara lengkap Buzan mendefinisikan *security complex* dalam bukunya, *People, State, and Fear First Edition* (1983) sebagai:

*“A group of states whose primary security concerns link together sufficiently closely that their national securities cannot reasonably be considered apart from one another.”*¹²

Konsep yang ditawarkan oleh Buzan ini (*regional security complex*) mencakup aspek persaingan maupun kerja sama di antara negara-negara terkait, utamanya yang berada dalam satu kawasan yang sama. Dengan logika RSC tersebut, Korea Selatan yang secara geografis berdekatan dengan Jepang akan menerima persepsi ancaman keamanan yang sama. Dalam konteks GSOMIA, Korea Selatan dan Jepang merasa bahwa senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara merupakan ancaman eksistensial yang mereka terima di kawasan Asia Timur yang sekaligus menjadi variabel RSC di kawasan tersebut.

Faktor kedekatan geografis hanyalah satu dari beberapa variabel RSC. Dalam menggambarkan sebuah kompleks keamanan kawasan, setidaknya terdapat empat hal lain yang menjadi struktur dasar yang membentuknya, yaitu kedekatan geografis, struktur kawasan yang anarki, polaritas kekuatan, dan konstruksi sosial berupa pola persahabatan dan permusuhan (*pattern of amity and enmity*).¹³ Hubungan Korea Selatan dengan

Jepang baik itu secara umum maupun dalam konteks GSOMIA dapat dilihat dari pola persahabatan dan permusuhannya (*pattern of amity and enmity*). Hubungan keduanya yang sarat akan konflik sejarah sangat memungkinkan untuk dilakukannya analisis sejarah atau konstruksi sosial yang mempengaruhi kerja sama sehingga menjadi rentan terhadap berbagai kemungkinan seperti diakhirinya kerja sama tersebut.

kawasan Asia Timur dikategorikan sebagai RSC berdasarkan pada negara-negara yang secara geografis berdekatan di dalam kawasan mengalami saling ketergantungan keamanan, keadaan kawasan yang anarki menyebabkan adanya perimbangan kekuatan di kawasan yang membentuk polaritas, serta pola-pola persahabatan dan permusuhan antar negara dalam kawasan yang merupakan konstruksi sosial.¹⁴ Faktor persahabatan dan permusuhan antara Korea Selatan dengan Jepang menyebabkan kompleksnya masalah keamanan di kawasan dikarenakan di satu sisi mereka perlu melakukan kerja sama keamanan guna mengimbangi kekuatan nuklir Korea Utara namun di sisi yang lain sejarah hubungan kedua negara juga tidak baik di dalam kawasan sehingga permasalahan keamanan di kawasan ini sangatlah kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HUBUNGAN BILATERAL ANTARA KOREA SELATAN DAN JEPANG

Selama pendudukan Jepang atas Korea terjadi, setidaknya sekitar ratusan bahkan ribuan orang Korea terbunuh, terluka, atau diperkosa dan sekitar 60.000 sampai 70.000 nya dibawa ke Jepang sebagai tawanan perang atau dijadikan budak, bahkan banyak dari anak mudanya dipaksa untuk pergi ke garis depan Perang Dunia II sebagai pasukan Jepang—sedangkan perempuan mudanya dipaksa untuk melayani pasukan Jepang secara seksual dan

¹² Buzan dan Wæver, Op.cit., 44.

¹³ Ibid., 53.

¹⁴ Buzan, op.cit., 53.

biasa disebut sebagai *comfort women*.¹⁵ Pendudukan yang dilakukan selama lebih 35 tahun tersebut memunculkan luka mendalam bagi warga Korea sehingga mengakibatkan *historical aminosity*, khususnya Korea Selatan terhadap Jepang.

Aspek historis seperti *historical animosity* ini kemudian menjadi faktor yang sangat kental mendasari sulitnya hubungan bilateral kedua negara. Salah satu isu yang diangkat jika terjadi ketegangan dalam hubungan kedua negara adalah isu *Comfort Women* atau kelompok wanita yang direkrut dan dipaksa menjadi pekerja seks bagi tentara Jepang selama masa perang. Sejak normalisasi dilakukan pada tahun 1965 hingga saat ini, permasalahan *comfort women* selalu dikaitkan jika terjadi krisis hubungan di antara keduanya bersama dengan masalah lainnya. Pemerintah Jepang pada dasarnya telah berusaha untuk menormalisasi hubungan dengan membangun *future-oriented relationship*, namun upaya ini mengalami kesulitan karena keengganan Korea Selatan yang merasa Jepang sebagai sumber masalah utama karena tidak secara tulus meminta maaf dan menangani isu tersebut.¹⁶ Terbukti sejauh ini masyarakat Korea yang menderita kerugian akibat pemerintahan kolonial Jepang belum mendapatkan kompensasi rugi dan masih belum terselesaikan.¹⁷

Normalisasi Hubungan Bilateral tahun 1965

Setelah masa pendudukan, Jepang dan Korea Selatan membutuhkan waktu sekitar dua dekade untuk memulihkan hubungan diplomatik. Pada dasarnya hubungan bilateral

kedua negara dapat dianggap hampir tidak ada selama dua dekade awal periode pasca perang, namun kemudian di bawah tekanan Amerika Serikat barulah keduanya menjalin hubungan diplomatik secara resmi pada 1965.¹⁸

Setelah perjanjian normalisasi disepakati kedua negara pada 1965, perang atau konflik militer tidak pernah terjadi lagi di antara keduanya sejak 1945, bahkan keduanya juga membangun dan membina hubungan ekonomi secara luas, terbukti dengan Jepang menjadi pemasok utama di bidang teknologi dan modal bagi Korea Selatan, sementara secara konsisten Korea Selatan berada di posisi empat besar pasar ekspor Jepang.¹⁹ Keduanya secara perlahan mulai membangun hubungan baik secara politik maupun ekonomi guna menjaga stabilitas kawasan dan demi kepentingan masing-masing negara. Dalam praktiknya, Tokyo-Seoul memfasilitasi kerja sama dengan sepakat mengadakan konferensi di tingkat Menteri yang dimulai pada tahun 1967, dan juga membentuk sejumlah organisasi lain seperti Komite Kerja Sama Jepang-Korea Selatan, Liga Parlemen Jepang-Korea Selatan, dan Komite Kerja Sama Ekonomi Jepang-Korea.²⁰

Melalui pertemuan berkala organisasi-organisasi tersebut, para pemimpin Jepang dan Korea Selatan bertukar pandangan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dan sering menyusun rencana untuk mempromosikan kerja sama ekonomi antara kedua negara. Meski secara bilateral hubungan keduanya cukup bagus, masing-masing pihak masih tetap melakukan evaluasi terhadap hubungannya mengingat riwayat konflik

¹⁵ Hong N. Kim, "Japanese-Korean Relations in the 1980s," *Asian Survey* 27, no. 5 (Mei, 1987): 497, doi: 10.2307/2644852.

¹⁶ Taku Tamaki, "It takes two to Tango: the difficult Japan-South Korea relations as clash of realities," *Japanese Journal of Political Science* 21, Issue 1 (Maret 2020): 1-2, doi: <https://doi.org/10.1017/S1468109919000161>.

¹⁷ Sang-Yeon Kim, "Bilateral Relationship of the Republic of Korea and Japan: Collective Memory and

National Identity of the Republic of Korea and Japan," (PhD diss., Halmstad University, 2013), 6.

¹⁸ David Hundt dan Roland Bleiker, "Reconciling Colonial Memories in Korea and Japan," *Asian Perspective* 31, no. 1, (Maret 2007): 66.

¹⁹ Hyung Gu Lynn, "Systemic Lock: The Institutionalization of History in Post-1965 South Korea-Japan Relations," *The Journal of American-East Asian Relations* 9, no. 1-2 (Spring-Summer 2000): 55, doi: <https://doi.org/10.1163/187656100793645976>.

²⁰ Hong N. Kim, Op.cit., 498.

keduanya masih membekas terutama di pihak Korea Selatan sehingga baik orang-orang Korea maupun Jepang menyebut bahwa hubungan keduanya adalah tetangga yang dekat namun jauh yang menandakan mengapa masalah sejarah atau *animosity history* sangat penting dalam hubungan keduanya.²¹

Namun, dari tahun 1972 hingga 1974, kebangkitan isu *historical animosity* dan sengketa bilateral domestik hampir membuat hubungan keduanya putus untuk kedua kalinya dalam periode dua tahun yang singkat ditambah lagi dengan masalah sengketa wilayah atas pulau Dokdo/Takeshima yang pada dasarnya merupakan sengketa territorial namun juga menjadi perpanjangan dari sengketa sejarah pemerintahan kolonial Jepang, yang mana masalah ini juga menjadi kendala tambahan dalam perkembangan hubungan mereka.²² Meskipun pada dasarnya sengketa pulau ini lebih karena dapat membawa keuntungan secara politis maupun kepentingan keamanan militer dan keuntungan ekonomi dari perluasan area tangkapan ikan bagi kedua negara.

ANALISIS KERJA SAMA GSOMIA JEPANG-KOREA SELATAN

GSOMIA Jepang-Korea Selatan

Korea Selatan dan Jepang pasca normalisasi hubungan pada tahun 1965 dapat dikatakan hampir tidak memiliki kerja sama yang substansial di bidang keamanan selama tiga dekade. Baru pada pertengahan dekade 90an keduanya mulai melakukan tindakan membangun kepercayaan atau *Conflict*

Building Measures (CBMs) dengan mengatur pertemuan yang membahas kebijakan keamanan serta meningkatkan pertukaran informasi dan personel militer.²³ Ancaman nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin menjadi isu yang menonjol dan menekan keduanya untuk membangun hubungan khususnya di bidang keamanan dan untuk sementara waktu mengesampingkan permasalahan sejarah keduanya.²⁴

Korea Utara mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam percepatan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik sejak Kim Jong-un berkuasa. Dunia internasional dan terkhusus negara-negara di kawasan Asia Timur pun skeptis akan stabilitas keamanan kawasan karena hal tersebut. Rezim Kim Jong-un diketahui telah mampu untuk memproduksi bom sekilas uranium dan plutonium yang merupakan elemen utama yang diperlukan dalam membuat material fisil serta uji coba hulu ledak nuklir dengan serangkaian rudal yang berbeda, termasuk rudal balistik jarak pendek, medium, menengah, antarbenua, dan yang diluncurkan oleh kapal selam.²⁵

Dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang yang dibantu Amerika Serikat memiliki dua strategi yaitu, pertama mengerahkan sistem anti-rudal balistik atau *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD), dan strategi kedua menyusun kerangka hukum perjanjian kerja sama berbagi informasi militer atau *General Security of Military Agreement* (GSOMIA).²⁶ Pengesahan GSOMIA Jepang-Korea Selatan dapat memperkuat hubungan keduanya sekaligus hubungan segitiga keamanan

²¹ Sang-Yeon Kim, loc.cit.

²² Ibid.

²³ Ji Young Kim, "Rethinking the Role of Identity Actors: The History Problem and the Japan-South Korea Security Relationship in the Post-Cold War Period," *International Relations of the Asia-Pacific* 15, no. 3 (April 2015): 2, doi:10.1093/irap/lcv007.

²⁴ Ibid.

²⁵ Eleanor Albert, "North Korea's Military Capabilities," *Council on Foreign Relations*, November

16, 2020, <https://www.cfr.org/backgrounder/north-koreas-military-capabilities>.

²⁶ Jahyun Chun dan Yangmo Ku, "Clashing Geostrategic Choices in East Asia, 2009-2015: Re-balancing, Wedge Strategy, and Hedging," *The Korean Journal of International Studies* 18, no.1 (April 2020): 41, doi.org/10.14731/kjis.2020.04.18.1.33.

bersama Amerika Serikat di dalam kawasan dengan meningkatkan pertukaran atau berbagi informasi rahasia militer.²⁷

Awalnya pihak Korea Selatan mengajukan tawaran kerja sama pertama kali pada tahun 1989, namun saat itu kedua negara masih belum dapat mencapai kesepakatan bersama.²⁸ Sejak saat itu, Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba nuklir pada tahun 2006 dan 2009 yang membuat Jepang juga khawatir dan mulai mengambil langkah dengan mempertimbangkan GSOMIA, namun masih belum menemui kesepakatan dengan Korea Selatan hingga tahun 2012 akibat permasalahan prosedural dan protes dari masyarakat Korea Selatan karena sentimen anti-Jepang yang kuat, ditambah dengan keraguan pemerintah Korea Selatan terhadap rencana remilitarisasi Jepang.

Setelah melalui serangkaian proses dan diskusi yang panjang, dimulai dari *bilateral summit*, pertemuan dewan keamanan nasional, pembahasan di tingkat kementerian (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan), hingga disetujui oleh Kantor Legislasi, akhirnya kedua negara sepakat untuk menandatangani kerja sama pada 23 November 2016.²⁹ Perjanjian baru mulai berlaku setelah keduanya memberi tahu prosedur ratifikasi internal masing-masing telah rampung melalui saluran diplomatik.³⁰ Pada dasarnya informasi yang dipertukarkan mengenai Korea Utara (terutama aktivitas dan perkembangan senjata nuklir) serta informasi intelijen lainnya yang diklasifikasikan sebagai *confidential*, *highly confidential*, dan *secret*.³¹

Konstruksi *Amity* dan *Enmity* Korea Selatan dan Jepang

Pola persahabatan dan permusuhan Korea Selatan dengan Jepang di kawasan Asia Timur pada dasarnya merupakan realita sosial yang terkonstruksi ke dalam sistem akibat faktor sejarah. Imperialisme dan antagonisme terhadap Semenanjung Korea hingga pelbagai permasalahan sejarah lainnya seperti isu *comfort women* telah membentuk sentimen anti Jepang di kalangan masyarakat Korea Selatan. Dari generasi ke generasi, sikap antipati tersebut telah tertanamkan melalui media dan pendidikan sejarah Korea Selatan dan telah menjadi identitas dan nasionalisme bangsa.³² Dalam banyak kasus, sentimen terhadap pihak yang dianggap lawan dapat didasari dalam dua hal, yaitu pertama berdasar pada pengalaman sejarah dan kedua akibat politisasi atau sejauh mana isu dijadikan argumentasi sentimen.³³ Kawasan Asia Timur tidak terkecuali dalam pengalaman sejarah yang penuh konflik dan politisasi sentimen tersebut.

Imperialisme Jepang terhadap negara-negara di kawasan memberikan warisan sejarah berupa kondisi traumatis dan rasa benci, namun keadaan seperti ini juga tidak jarang dipolitisasi oleh elit politik, seperti dalam konteks GSOMIA yang juga berawal dari sejarah masa lalu atau *historical animosity* dan berimplikasi terhadap berbagai aspek atau isu seperti *comfort women*, penyelesaian kompensasi bagi buruh pada masa perang, pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan dan bentuk-bentuk sentimen lainnya.

²⁷ Ibid, 41-42.

²⁸ Ministry of National Defense, "Direct mutual sharing of North Korean nuclear and missile information," *Ministry of National Defense Republic of Korea*, November 30, 2016, https://www.mnd.go.kr/user/boardList.action?command=view&page=1&boardId=O_47261&boardSeq=O_145439&titleId=null&id=mnDnEN_020100000000&siteId=mnDnEN.

²⁹ David Kang dan Jiun Bang, Op.cit., 92.

³⁰ MND, Op.cit., 256.

³¹ Chung Min Lee, "Prospects for US-South Korean-Japanese Trilateral Security Cooperation: in an Era of

Unprecedented Threats and Evolving Political Forces," (Atlantic Council, 2018), 13.

³² Jihwan Hwang, "Rethinking the East Asian Balance of Power: Historical Antagonism, Internal Balancing, and the Korean-Japanese Security Relationship," *World Affairs* 166, no. 2 (Fall 2003): 95.

³³ Il Hyun Cho dan Seo-Hyun Park, "Anti-Chinese and Anti-Japanese Sentiments in East Asia: The Politics of Opinion, Distrust, and Prejudice," *The Chinese Journal of International Politics* 4, Issue 3 (Autumn 2011): 269, doi:10.1093/cjip/por010

Permasalahan sejarah kedua negara tersebut secara umum menggambarkan bahwa terdapat *long-standing enmity* di antara keduanya. Sejarah merupakan masalah penting dalam hubungan kedua negara. Berdasarkan salah satu jajak pendapat yang dilakukan pada akhir Mei 2019, hampir 87% warga Korea Selatan menyatakan bahwa pemerintah Jepang harus mengeluarkan permintaan maaf lagi terkait masalah *comfort women*, sedangkan hanya 11% masyarakat Jepang yang setuju dengan sentimen ini.³⁴ Isu *comfort women* merupakan satu dari sekian permasalahan sejarah kedua negara yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan seperti ini pada akhirnya akan mengkonstruksi hubungan keduanya menuju pada *enmity* daripada *amity*.

Dari hasil jajak pendapat publik tersebut tergambarkan dengan jelas bahwa hubungan Korea Selatan dan Jepang merupakan *long-standing enmity* yang dipengaruhi oleh faktor sejarah atau *historical animosity*. *Historical animosity* antar negara memang menjadi salah satu penyebab kompleksnya masalah keamanan di kawasan Asia Timur selain elemen ketidakpastian lainnya yang juga berakibat pada stabilitas keamanan kawasan.

Sejak melakukan normalisasi hubungan bilateral pertama kali pada tahun 1965, Jepang dan Korea Selatan telah berkali-kali mengalami pasang-surut hubungan dikarenakan permasalahan sejarah, sengketa teritorial dan lainnya. Tiap-tiap permasalahan di antara kedua negara saling berkaitan satu dengan lainnya dan selalu menjadi pemicu semakin meluasnya cakupan permasalahan keduanya setiap kali suatu isu mencuat ke

publik dan menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Isu *Comfort Women*

Comfort women adalah term yang disematkan kepada kelompok wanita yang menjadi korban perekrutan secara paksa oleh militer Jepang untuk menjadi pekerja seks bagi tentara Jepang. Banyak dari wanita muda Korea yang dipaksa untuk melayani tentara Jepang secara seksual saat Perang Dunia II berlangsung. korban pertama dari praktik ini adalah wanita Korea dari daerah Kyushu Utara, Jepang yang dikirim oleh Gubernur Prefektur Nagasaki atas permintaan salah satu komanadan Angkatan bersenjata.³⁵ Diketahui sekitar 200.000 wanita Korea menjadi korban dari praktik perbudakan seksual yang dilakukan secara sistematis dan secara paksa oleh komando militer dengan sepengetahuan pemerintah Jepang.³⁶ Bukti keterlibatan langsung militer Jepang terkait kasus ini semakin diperkuat setelah sejarawan Yoshimi Yoshiaki menemukan peran langsung militer Jepang dalam menjaga *comfort station* di dalam arsip dokumen pemerintah milik Kementerian Pertahanan yang kemudian temuan ini diterbitkan surat kabar nasional Jepang, *Asahi Shimbun* pada Januari 1992.³⁷ Para korban banyak ditempatkan diberbagai rumah bordil atau *comfort station* di daerah tantara-tentara Jepang ditugaskan.

Isu sejarah seperti ini sangat mudah menjadi pemicu bagi menguatnya sentimen antara Korea Selatan dengan Jepang setiap kali kedua negara mengalami friksi dalam hubungannya. Upaya rekonsiliasi terkait isu ini sering dilakukan namun terbilang sulit karena perbedaan sudut pandang antara kedua negara. Seperti Jepang yang berdalih dengan

³⁴ J. James Kim dan Kang Chungku, "South Korean Attitudes about ROK-Japan Relations on the Rocks," Issue Brief. Asan Institute for Policy Studies, 2019. Access August 2, 2021.

<https://en.asaninst.org/contents/south-korean-attitudes-about-rok-japan-relations-on-the-rocks/>.

³⁵ Radhika Coomaraswamy, "Report on the mission to the Democratic People's Republic of Korea, the

Republic of Korea and Japan on the issue of military sexual slavery in wartime," (United Nations; Economic and Social Council; Commission on Human Rights, 1996), 5.

³⁶ Ibid., 17.

³⁷ Gabriel Jonsson, "Can the Japan-Korea Dispute on 'Comfort Women' be Resolved?" *Korea Observer* 46, no. 3 (September 2015): 7-8.

adanya layanan prostitusi yang dilembagakan dimaksudkan agar dapat menekan jumlah laporan pemerkosaan di tempat-tempat tantara Jepang ditugaskan.³⁸ Alasan lainnya yang lebih menyakitkan bagi Korea Selatan adalah Jepang beralasan pembentukan rumah bordil *comfort women* ada agar pemerintah Jepang dapat mengawasi dan mengatur penyebaran penyakit kelamin dan yang lebih parahnya lagi menganggap para pekerja wanita tersebut memberikan jasa tanpa adanya paksaan dan tindak kekerasan.³⁹

Selain mendapat kecaman keras dari Korea Selatan atas semua dalih dan penyengkalan Jepang terkait isu tersebut, PBB juga merilis laporannya terkait kasus pelanggaran HAM ini dan meminta Jepang untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang menjadi korban dari praktik perbudakan seksual tersebut. Radika Coomaraswamy yang merupakan reporter khusus tentang kekerasan terhadap perempuan di komisi HAM PBB merilis laporannya yang juga berisi testimoni dari para penyintas bahwa benar mereka telah mengalami tindak kekerasan dan dipaksa menjadi pekerja seks bagi tantara Jepang di wilayah perang. Testimoni atau keasksian dari laporan tersebut semakin menguatkan dan memberikan validasi atas tindakan Jepang dan menuntut rekonsiliasi berupa pernyataan permintaan maaf, biaya kompensasi, dan lain sebagainya.

Setelah terdesak akhirnya Jepang mencoba untuk melakukan rekonsiliasi dengan mempertanggungjawabkan kesalahannya

dengan menjawab tuntutan dari Korea Selatan. Lewat *Kono Statement* pemerintah Jepang mengakui terlibat dan mengetahui pengelolaan rumah bordil atau *comfort station* dan mengakui jika wanita yang direkrut memberikan jasanya secara terpaksa serta hidup dalam kesengsaraan selama Perang Dunia II.⁴⁰ Isu ini hampir selalu melatarbelakangi dan menjadi faktor pemicu dalam dinamika hubungan Jepang dan Korea Selatan di era saat ini. Sehingga demi berjalannya rekonsiliasi, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women*. Dalam kesepakatan tersebut, pemerintah Jepang lewat Perdana Menteri Shinzo Abe menyampaikan permintaan maaf Jepang secara resmi dan akan membayar 8,5 juta USD guna membangun yayasan khusus bagi korban beserta keluarga korban *comfort women*.⁴¹ Permintaan maaf secara resmi tersebut disampaikan secara langsung lewat sambungan telepon kepada Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye yang mengkonfirmasi kesepakatan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri kedua belah pihak.⁴² Peristiwa ini kemudian disebut sebagai *Japan-ROK Summit Telephone Call*.

Meskipun kesepakatan telah dicapai terkait isu ini pada tahun 2015, hubungan diplomatik antara Jepang dengan Korea Selatan terus mengalami ketegangan. Permasalahan *comfort women* yang telah dianggap selesai perlahan mulai berantakan pada 2017 karena dukungan publik yang rendah, terutama di Korea Selatan.⁴³ Beru

³⁸ Ibid.

³⁹ Jeniffer Gracellia, "Implikasi Penanganan Masalah Comfort Women Terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pada Tahun 2015-2019," *Verity – UPH Journal of International Relations* 11, no. 21 (January – June 2019): 2.

⁴⁰ Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1993). Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of "comfort women". Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html>

⁴¹ Ministry Foreign Affairs of Japan. (2015). Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html

⁴² Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015). Japan-ROK summit telephone call. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000366.html

⁴³ Ankit Panda. 'The 'Final and Irreversible' 2015 Japan-South Korea Comfort Women Deal Unravels,' *thediplomat.com* (Daring) 9 Januari, 2017, <https://thediplomat.com/2017/01/the-final-and-irreversible/>

kemudian pada 2019 *Comfort Women Deal* secara efektif dibatalkan dan berakhir saat pemerintahan Presiden Moon Jae In membubarkan yayasan khusus penyintas *comfort women* yang dibangun dari dana pemberian pemerintah Jepang pada tahun 2015 lalu sebagai bentuk permintaan maaf atas permasalahan tersebut.⁴⁴

Isu ini menjadi salah satu faktor yang memberikan implikasi kuat terhadap perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Dalam konteks GSOMIA, semua variabel seperti permasalahan sengketa dagang, aksi pemboikotan produk Jepang karena sentimen warga Korea Selatan terkait permasalahan di masa lalu, tuntutan Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai kompensasi kepada para korban buruh paksa selama masa perang, dan permasalahan *comfort women* saling terkait dan berhubungan kuat dalam mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Bahkan semua permasalahan tersebut tidak berhenti pada setiap respon pemerintah dengan kebijakannya saja, melainkan juga telah sampai ke level warga yang sama-sama memiliki sentimen anti satu dengan yang lain yang semakin memperburuk hubungan kedua negara bahkan di masa yang akan datang.

Isu Kompensasi bagi Buruh Masa Perang

Setelah melayangkan tuntutan terhadap kasus *comfort women*, Mahkamah Agung Korea Selatan juga mengeluarkan putusan perihal kasus yang melibatkan mantan pekerja pada masa perang terkait gaji yang belum dibayarkan oleh perusahaan Jepang pada tanggal 24 Mei 2012.⁴⁵ Pada dasarnya kedua isu ini sudah coba diselesaikan lewat normalisasi hubungan bilateral keduanya lewat *claims settlement agreement* terkait kerja

sama ekonomi serta ganti rugi atas kerusakan yang terjadi selama masa kolonial, namun terdapat perbedaan interpretasi antara keduanya terkait hal ini. Pihak Jepang merasa semua masalah terkait pendudukan Jepang terhadap Korea Selatan telah diselesaikan lewat perjanjian normalisasi pada 1965.

Pemerintah Jepang selalu bersikap dan menganggap semua masalah tersebut telah diselesaikan lewat penandatanganan *claims settlement agreement* terkait setiap tuntutan Mahkamah Agung Korea Selatan mengenai isu *comfort women* dan pemberian kompensasi buruh masa perang. Dalam pasal 2 ayat 1 *claims settle agreement* menyatakan secara sah bahwa masalah-masalah terkait klaim antara kedua negara telah diselesaikan hingga ke tingkat masyarakat sepenuhnya (yang menjadi korban) dan dalam paragraf lainnya (paragraf 2) juga disebutkan bahwa seluruh klaim Korea Selatan atas Jepang dalam *claims settle agreement* mengenai properti dan klaim serta mengenai kerja sama ekonomi juga telah diselesaikan sepenuhnya, yang secara eksplisit menyatakan Korea Selatan mengklaim jumlah piutang, kompensasi, dan pemenuhan hak atas pekerja Korea Selatan yang direkrut oleh Jepang dan perjanjian ini tidak dapat diganggu gugat nantinya.⁴⁶

Meskipun pada dasarnya perjanjian tidak dapat ditinjau ulang untuk kemudian dibatalkan, Mahkamah Agung Korea Selatan tetap melayangkan tuntutan terhadap perusahaan Jepang dan memutuskan perjanjian karena dianggap klaim terkait kompensasi tidak tunduk pada ketentuan perjanjian karena seharusnya individu yang menjadi korban (*comfort women* dan pekerja paksa) bisa mengajukan tuntutan di luar *claims settlement agreement*, bertolak belakang dengan

[irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/](https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/05/national/politics-diplomacy/south-korea-formally-closes-japan-irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/), diakses pada 1 Agustus 2021.

⁴⁴ Japan Times. 'South Korea formally closes Japan-funded 'comfort women' foundation,' *japantimes.co.jp* (daring) 5 Juli, 2019,

[https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/05/national/politics-diplomacy/south-korea-formally-closes-japan-](https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/05/national/politics-diplomacy/south-korea-formally-closes-japan-irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/)

[funded-comfort-women-foundation/](https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/05/national/politics-diplomacy/south-korea-formally-closes-japan-irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/), diakses pada 1 Agustus 2021.

⁴⁵ Hideki Okuzono, "South Korean Judiciary Shakes Japan-South Korea Relations," *East Asia*, no.559 (2014): 3.

⁴⁶ Ibid., 2-3.

pemerintah Jepang yang beranggapan semua telah terselesaikan dengan *claims settlement agreement*.⁴⁷ Jepang merasa diberatkan atas tuntutan tersebut karena akan sangat memberatkan anggaran negara jika harus memberikan kompensasi kepada para korban Perang Dunia II, termasuk korban *comfort women* dan pekerja paksa.

Jepang yang keberatan tentu tidak akan menerima secara bulat tuntutan tersebut, lalu kemudian merespon dengan menghapus Korea Selatan dari daftar mitra dagang atau *white-list* dan melakukan pembatasan ekspor.⁴⁸ Kemudian pihak Korea Selatan juga melakukan hal yang sama dengan menghapus keanggotaan Jepang sebagai daftar mitra eksportnya. Dari sinilah akar sengketa dagang antara kedua negara yang juga menjadi implikasi dari penarikan diri Korea Selatan dalam GSOMIA. Meskipun mendapati berbagai kerugian dan semakin memperburuk hubungan dengan Korea Selatan, pemerintah Jepang menolak untuk terlibat ke dalam diskusi mengenai tuntutan tersebut dengan alasan sebelumnya, yakni telak menyelesaikan segala permasalahan tersebut di dalam *claims settlement agreement*.

Menghadapi penolakan Jepang atas tuntutan tersebut, Korea Selatan mengambil sikap ganda yakni, pertama meminta Jepang untuk melakukan pembicaraan bilateral untuk membahas masalah *comfort women* dan masalah lainnya karena hal-hal tersebut berada di luar *claims settlement agreement* dan belum terselesaikan; kedua, pemerintah Korea Selatan akan tetap pada pendiriannya mengenai para pekerja paksa di mana tidak adanya alternatif selain menganggap masalah telah

terselesaikan.⁴⁹ Permasalahan ini akan terus berlanjut dan tidak akan terselesaikan meski keduanya telah mencoba untuk menormalisasi hubungan dan melakukan rekonsiliasi namun tidak diiringi dengan pemahaman mendasar baik itu mengenai masalah *comfort women* maupun pemberian kompensasi kepada para pekerja paksa pada masa Perang Dunia II tersebut.

Sengketa Dagang Jepang-Korea Selatan pada 2019

Sengketa dagang Jepang-Korea Selatan merupakan salah satu contoh masalah yang sangat jelas terlihat akibat dari politisasi isu. Ketika Jepang memberlakukan pembatasan ekspor bahan semi-konduktor Korea Selatan dengan memperketat kontrol produk yang masuk dan mempersulit proses masuknya, pihak Jepang mengakui bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai reaksi mereka terhadap putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018 yang memerintahkan perusahaan Jepang *Nippon Steel* dan *Mitsubishi Heavy* untuk membayar kompensasi kepada para korban kerja paksa selama periode perang.⁵⁰ Sentimen akibat permasalahan sejarah kembali menjadi pemicu setiap konflik dan hubungan kedua negara dan memang tak jarang dipolitisasi demi kepentingan negara. Kelompok nasionalis memang sering menggunakan isu yang berhubungan dengan sejarah konflik kedua negara sebagai alat politik. Seperti putusan Mahkamah Agung Korea Selatan di atas yang didukung oleh partai berkuasa kala itu, *Democratic Party of Korea* (DPK) yang menjadikan sentimen anti-Jepang sebagai alat politik yang dibalut rasa nasionalisme.⁵¹

⁴⁷ Ibid., 4.

⁴⁸ Laura Bicker, "Japan to strike South Korea off trusted export list as rift deepens," *BBC*, August 2, 2019, <https://www.bbc.com/news/business-49201707>.

⁴⁹ Hideki, Op.cit., 7.

⁵⁰ Agence France-Presse. 'Japan moves to curb exports to South Korean tech firms, in escalation of forced labour row,' *scmp.com* (daring) 1 Juli, 2019, <https://www.scmp.com/news/asia/east->

[asia/article/3016756/japan-hits-back-south-korea-forced-labour-row-tightening-rules](https://www.scmp.com/news/asia/east-), diakses pada 7 Februari 2021; Henry Storey. 'History haunts Japan-South Korea ties,' *lowyinstitute.org* (daring) 4 Februari, 2021, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/history-haunts-japan-south-korea-ties>, diakses pada 7 Februari 2021.

⁵¹ Ibid.

Sengketa dagang yang dipicu oleh permasalahan sejarah tersebut semakin berkembang permasalahannya ketika Jepang bereaksi atas tuntutan Mahkamah Agung dengan menghapus Korea Selatan dari mitra dagang strategis atau *white-list* yang berarti ekspor barang-barang strategis Jepang yang biasa digunakan oleh militer atau industri senjata Korea Selatan harus menjalani pemeriksaan tambahan dan izin yang lebih banyak dan lama untuk disetujui, sedangkan waktu izin ekspor pendek sehingga produk tidak digunakan oleh Korea Selatan.⁵² Kemudian Korea Selatan pun bereaksi dengan juga menghapus Jepang dari *white-list* sekaligus mengajukan keluhan kepada *World Trade Organization* (WTO) atas pembatasan ekspor bahan baku utama industri Jepang tersebut karena langkah ini dinilai sangat politis karena diskriminatif dengan hanya menargetkan Korea Selatan sehingga tindakan ini dipandang sebagai balasan terhadap putusan Mahkamah Agung Korea Selatan yang menuntut perusahaan Jepang untuk membayarkan kompensasi kepada korban kerja paksa di masa perang.⁵³ Perang Dagang ini merupakan titik terendah hubungan kedua negara dalam beberapa dekade setelah normalisasi hubungan pada tahun 1965.

Sejarah kebencian seperti inilah yang mendorong terjadinya konflik, membentuk konstelasi ketakutan dan ancaman, sedangkan jika sejarah hubungan positif atau terdapat hubungan pertemanan, maka akan mendorong kerja sama, dan hal-hal tersebutlah yang menentukan sebuah kompleksitas keamanan kawasan. Pola persahabatan dan permusuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membelakanginya, seperti sejarah, budaya,

agama, geografis, namun dalam perkembangannya tetap akan ditentukan oleh sikap dan kebijakan yang diambil suatu aktor/negara.⁵⁴

Dalam kasus Jepang dan Korea Selatan, pola permusuhan lebih kental dan dominan dibandingkan dengan pola persahabatan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya *conflict formation* akibat meningkatnya *enmity* atau dalam bentuk negatif. Sedangkan dalam bentuk positifnya, *amity* tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan *enmity* yang ditandai dengan absennya *security community* di kawasan yang menggambarkan anarkisme kawasan (kerja sama yang mengatur keamanan kawasan sangat minim). GSOMIA Jepang-Korea Selatan masih belum dapat dianggap sebagai sebuah *security community* karena memerlukan pengakuan dari negara-negara lain di kawasan tersebut mengenai kepentingan bersama yang dibawa dan dijaga dalam kerja sama. *Reassurance arrangement* atau pengaturan jaminan lebih tepat menjelaskan posisi GSOMIA karena kerja sama ini dibentuk guna mengurangi dilema keamanan disamping adanya ancaman nuklir Korea Utara di kawasan. Beban sejarah menyebabkan sulit bagi kedua negara tersebut khususnya untuk saling bekerja sama sekalipun terdapat kepentingan bersama.⁵⁵

KESIMPULAN

Penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa hubungan kerja sama antara Korea Selatan dan Jepang dalam Perjanjian Perlindungan Informasi Militer atau *General Security Information Agreement* (GSOMIA) sangat dipengaruhi oleh faktor

⁵² Alexandra Ma. 'A selfish, destructive act': Japan and South Korea cut each other from export whitelists as their trade war reignites World War II tensions,' *businessinsider.com* (daring) 2 Agustus, 2019, <https://www.businessinsider.com/japan-south-korea-trade-war-whitelist-preferential-partners-wwii-tensions-2019-8?r=US&IR=T>, diakses pada 7 Februari 2021.

⁵³ The Strait Times. 'South Korea to exclude Japan from trade whitelist this week,' *straittimes.com* (daring) 15 September, 2019, <https://www.straittimes.com/asia/east-asia/south-korea-to-exclude-japan-from-trade-whitelist-this-week-yonhap>, diakses pada 7 Februari 2021.

⁵⁴ Buzan dan Wæver, Op.cit., 50.

⁵⁵ Jihwan Hwang, loc.cit.

sejarah seperti *long-standing enmity*. Meskipun sengketa dagang kedua negara merupakan pemicu utama kerja sama sempat ingin diakhiri, namun konstruksi sosial berupa *long-standing enmity* tersebut menjadi pertimbangan utama keduanya dalam setiap keputusan terkait kerja sama ini. Dengan melihat faktor sejarah tersebut, GSOMIA akan sangat rentan untuk berakhir meskipun bentuk kerja sama keamanan di tingkat kawasan seperti ini sangat diperlukan mengingat absennya rezim keamanan di kawasan Asia Timur. Masalah keamanan kawasan memang merupakan kondisi yang terbentuk dari pola hubungan persahabatan dan permusuhan sebagai implikasi dari hubungan buruk di masa lalu, sehingga sangat wajar jika permasalahan sejarah seringkali menjadi sesuatu yang politis.

Terlepas dari vitalnya kerja sama ini bagi keamanan kedua negara dalam menghadapi Korea Utara, isu yang berkaitan dengan sejarah atau *historical animosity* lebih kuat dalam mendasari setiap keputusan terkait GSOMIA. Meskipun pada akhirnya GSOMIA bertahan dan kerja sama tetap dilanjutkan, pihak Korea Selatan dapat mengakhiri kerja kapanpun sama oleh kedua negara dan Jepang telah menyetujui dan memahami kondisi syarat tersebut.⁵⁶ Kedepannya, ketentuan GSOMIA untuk diperbaharui pada tanggal 23 November tiap tahun sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan kesepakatan bahwa kerja sama dapat diakhiri kapan saja. Keputusan ini diambil oleh Korea Selatan pada menit-menit akhir kerja sama akan berakhir karena tekanan dari Amerika Serikat.

Dengan syarat dan ketentuan baru GSOMIA tersebut, kerja sama ini akan semakin rentan untuk berakhir merujuk pada buruknya hubungan kedua negara. Konflik yang terkait GSOMIA semakin mengarah pada peningkatan respon yang didasari oleh perasaan emosional yang menyebabkan

longgarnya hubungan dan juga dikhawatirkan penurunan hubungan bilateral tersebut akan berlangsung seterusnya atau bahkan permanen akibat semakin melebarnya rasa saling tidak mempercayai dan permusuhan di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Syahrin, M Najeri. *Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas*. Sleman: Komojoyo Press, 2018.
- Buzan, Barry, dan Ole Wæver. *Regions and Power: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Buzan, Barry. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Yani, Yanyan Mochamad, dkk., *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing, 2017.

Jurnal

- Cho, Il Hyun dan Seo-Hyun Park, "Anti Chinese and Anti-Japanese Sentiments in East Asia: The Politics of Opinion, Distrust, and Prejudice," *The Chinese Journal of International Politics* 4, Issue 3 (Autumn 2011): 265–290. <https://doi.org/10.1093/cjip/por010>.
- Chun, Jahyun dan Yangmo Ku. "Clashing Geostrategic Choices in East Asia, 2009-2015: Re-balancing, Wedge Strategy, and Hedging," *The Korean Journal of International Studies* 18, no.1 (April 2020): 33-57. doi.org/10.14731/kjis.2020.04.18.1.33.
- David Kang dan Jiun Bang, "Japan-Korea

⁵⁶ Kim Seung-yeon, 'S. Korea says it can end GSOMIA at any time, as mutually understood by Japan,' *Yonhap News Agency* (daring) 24 Agustus 2020,

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20200824004000325?section=search>, diakses pada 17 Maret 2021.

Relations: What Goes Up, Must Come Down,” *Comparative Connection* 18, no. 3 (Januari, 2017): 91-101.

Hundt, David dan Roland Bleiker.

“Reconciling Colonial Memories in Korea and Japan,” *Asian Perspective* 31, no. 1, (Maret 2007): 61-91. <http://www.jstor.org/stable/42704577>.

Hwang, Jihwan. “Rethinking the East Asian Balance of Power: Historical Antagonism, Internal Balancing, and the Korean-Japanese Security Relationship,” *World Affairs* 166, no. 2 (Fall 2003): 95-108.

Jonsson, Gabriel. “Can the Japan-Korea Dispute on “Comfort Women” be Resolved?” *Korea Observer* 46, no. 3 (September 2015): 489-515.

Kim, Hong N. “Japanese-Korean Relations in the 1980s,” *Asian Survey* 27, no. 5 (Mei, 1987): 497-514. <https://doi.org/10.2307/2644852>.

Kim, Ji Young. “Rethinking the Role of Identity Factors: The History Problem and the Japan–South Korea Security Relationship in the Post-Cold War Period.” *International Relations of the Asia-Pacific* 15, no. 3 (2015): 477-503.

Lynn, Hyung Gu. “Systemic Lock: The Institutionalization of History in Post-1965 South Korea—Japan Relations.” *The Journal of American-East Asian Relations* 9, no. 1/2 (2000): 55-84. <https://doi.org/10.1163/187656100793645976>.

Sheen, Seongho, dan Jina Kim. “What Went Wrong with the ROK-Japan Military Pact,” *Asia Pacific Buletin*, no. 176 (31 Juli, 2012): 1-2.

Tamaki, Taku. “It takes two to Tango: the difficult Japan–South Korea relations as clash of realities,” *Japanese Journal of Political Science* 21, Issue 1 (Maret 2020): 1-18.

<https://doi.org/10.1017/S1468109919000161>.

Laporan Penelitian

Lee, Chung Min. Report. Atlantic Council, 2018. Accessed June 7, 2021. <http://www.jstor.org/stable/resrep20935>.

Friedhoff, Karl, dan Kang Chungku. Report. Asan Institute for Policy Studies, 2013. Accessed February 2, 2021. <http://www.jstor.org/stable/resrep08148>.

Publikasi Resmi

Ministry Foreign Affairs of Japan (2015). Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1993). Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of “comfort women”. Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html>

Ministry of National Defense, *2016 Defense White Paper*, (Seoul, Republic of Korea: Ministry of National Defense, Republic of Korea, 2016), 1-324.

Radhika Coomaraswamy, “*Report on the mission to the Democratic People’s Republic of Korea, the Republic of Korea and Japan on the issue of military sexual slavery in wartime*,” (Geneva: United Nations; Economic and Social Council; Commission on Human Rights, 1996), 1-37. <https://digitallibrary.un.org/record/228137?ln=en>.

Artikel Berita

Agence France-Presse. “Japan moves to curb

exports to South Korean tech firms, in escalation of forced labour row,” *scmp.com* (daring) 1 Juli, 2019, <https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3016756/japan-hits-back-south-korea-forced-labour-row-tightening-rules>, diakses pada 7 Februari 2021.

Alexandra Ma. “A selfish, destructive act’: Japan and South Korea cut each other from export whitelists as their trade war reignites World War II tensions,” *businessinsider.com* (daring) 2 Agustus, 2019, <https://www.businessinsider.com/japan-south-korea-trade-war-whitelist-preferential-partners-wwii-tensions-2019-8?r=US&IR=T>, diakses pada 7 Februari 2021.

Ankit Panda. “The ‘Final and Irreversible’ 2015 Japan-South Korea Comfort Women Deal Unravels,” *thediplomat.com* (daring) 9 Januari, 2017, <https://thediplomat.com/2017/01/the-final-and-irreversible-2015-japan-south-korea-comfort-women-deal-unravels/>, diakses pada 1 Agustus 2021.

Eleanor Albert, “North Korea’s Military Capabilities,” *Council on Foreign Relations* (daring), November 16, 2020, <https://www.cfr.org/background/north-koreas-military-capabilities>.

Japan Times. “South Korea formally closes Japan-funded ‘comfort women’ foundation,” *japantimes.co.jp* (daring) 5 Juli, 2019, <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/07/05/national/politics-diplomacy/south-korea-formally-closes-japan-funded-comfort-women-foundation/>, diakses pada 1 Agustus 2021.

Kim Seung-yeon, ‘S. Korea says it can end

GSOMIA at any time, as mutually understood by Japan,’ *Yonhap News Agency* (daring) 24 Agustus 2020, <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200824004000325?section=search>, diakses pada 17 Maret 2021.

Laura Bicker, “Japan to strike South Korea off trusted export list as rift deepens,” *BBC* (daring), Agustus 2, 2019, <https://www.bbc.com/news/business-49201707>.

Ministry of National Defense, “Direct mutual sharing of North Korean nuclear and missile information,” *Ministry of National Defense Republic of Korea* (daring), November 30, 2016, https://www.mnd.go.kr/user/boardList.action?command=view&page=1&boardId=O_47261&boardSeq=O_145439&titleId=null&id=mndEN_02010000000&siteId=mndEN.

The Strait Times. “South Korea to exclude Japan from trade whitelist this week,” *straittimes.com* (daring) 15 September, 2019, <https://www.straittimes.com/asia/east-asia/south-korea-to-exclude-japan-from-trade-whitelist-this-week-yonhap>, diakses pada 7 Februari 2021.

Yuki Tatsumi. ‘Fallout from Japan-South Korea tensions,’ *japantimes.co.jp* (daring) 31 Januari 2019, <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/01/31/commentary/japan-commentary/fallout-japan-south-korea-tensions/>, diakses pada 20 Agustus 2021.

Disertasi

Kim, Sanygeon. “Bilateral Relationship of the Republic of Korea and Japan: Collective Memory and National Identity of the Republic of Korea and Japan,” PhD diss., Halmstad University, 2013.

